

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah peradaban umat manusia di mana pun, tidak pernah terlepas dari kisah tentang perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Kehidupan yang lebih baik dan sejahtera itu dapat diperoleh hanya ketika hak-hak paling dasar dari setiap pribadi bisa terpenuhi. Manusia-manusia Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang senantiasa berjuang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Sebagai sebuah negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokratis, negara Indonesia mempunyai sejumlah aturan kehidupan yang menjamin hak-hak pribadi masyarakatnya meskipun dalam pelaksanaan dan praktiknya belum bisa dikatakan maksimal. Salah satu hak paling dasar bagi setiap pribadi manusia Indonesia yang perlu dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi yaitu masing-masing pribadi diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Sebab kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik bisa tercipta apabila kebebasan tidak dikekang. Memang cukup sulit membicarakan kebebasan berpendapat di negara Indonesia yang sudah sejak awal hidup dalam sistem feodalisme yang cukup kental. Hal ini pernah disinggung oleh Mochtar Lubis bahwa salah satu ciri pribadi manusia Indonesia adalah memiliki jiwa yang feodal.¹ Di sini sering terjadi kesenjangan dalam relasi antara penguasa dan rakyat biasa yang berakibat pada tidak adanya kebebasan berpendapat. Sebab ada sebagian manusia diperlakukan sebagai tuan dan sebagiannya lagi diperlakukan sebagai budak.

Namun dalam suatu negara demokrasi kebebasan berpendapat mestinya dijamin. Sebab kebebasan berpendapat adalah hak paling dasar dari setiap pribadi untuk menyampaikan pikiran, ide dan pandangannya tanpa takut dihalangi atau ditekan oleh siapa pun, termasuk pemerintah. Hak ini sangat penting dalam sistem demokrasi karena memungkinkan masyarakat ikut serta dalam proses politik

¹ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia: Sebuah Pertanggungjawaban* (Jakarta: Idayu press, 1977), hlm. 28.

dengan memberikan sumbangan ide demi kemajuan bersama.² Pada intinya setiap orang berhak untuk mencari, memiliki, dan menyebarkan informasi dan pendapat tanpa campur tangan pihak lain. Selain itu, kebebasan berpendapat mencakup hak untuk mengakses informasi dari berbagai sumber dan menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau lembaga publik. Dari sisi politik, kebebasan berpendapat membantu masyarakat mengawasi dan mengkritik kinerja pemerintah sehingga tercipta pemerintahan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Kebebasan berpendapat menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang beragam dan inklusif, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam keputusan politik. Meski begitu, kebebasan ini tetap memiliki batasan, terutama jika digunakan untuk menyebarkan kebencian, kekerasan atau menyerang kelompok tertentu. Batasan ini bertujuan untuk melindungi hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Tidak dapat dimungkiri bahwa di banyak tempat di dunia terdapat banyak orang yang berani mengeluarkan pendapat tetapi kemudian mendapat perlakuan yang tidak adil dari penguasa. Dengan demikian masyarakat mesti perlu terus memperjuangkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu pilar penting demokrasi dan hak dasar manusia.³

Di Indonesia kebebasan berpendapat dijamin oleh negara melalui UUD 1945 dan baru mulai terlaksana secara lebih terbuka ketika terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998. Sejak dimulainya reformasi masyarakat diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Presiden Habibie yang memerintah pada saat itu, membuka kesempatan bagi siapa pun untuk berbicara, baik melalui pertemuan terbuka maupun aksi unjuk rasa. Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pendemo, pemerintah bersama DPR berhasil menyusun undang-undang yang mengatur tentang aksi unjuk rasa. Undang-undang tersebut adalah UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Keberadaan aturan ini menjadi bukti bahwa pemerintah mulai menerapkan sistem demokrasi secara nyata.⁴ Dikeluarkannya aturan tentang

² Syamsidar dkk., *Tantangan Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Era Digital* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴ Emita Distiana, *Masa Reformasi* (Kalimantan Barat: Penerbit Derwati Press, 2018), hlm. 38-39.

kebebasan berpendapat pada masa reformasi merupakan bentuk perubahan dan perbaikan terhadap sistem di zaman Orde Baru yang cenderung menekan dan menindas rakyat agar tidak secara leluasa mengeluarkan pendapatnya bagi keberlangsungan kekuasaan pemerintah.

Pada masa Orde Baru, pemerintah sangat kuat dalam membungkam kritik dan mengontrol penuh kehidupan masyarakat serta politik. Hak asasi manusia sering diabaikan dan tidak diperhatikan. Rezim ini menjalankan pembangunan ekonomi dengan cara yang keras dan militeristik.⁵ Sejak tahun 1966 pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru menunjukkan kekuasaan yang dominan dan cenderung menekan di berbagai aspek kehidupan. Dalam sistem politik Orde Baru ini, militer khususnya TNI Angkatan Darat memegang peran penting sebagai penggerak utama kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru secara sengaja membatasi ruang demokrasi melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang keras. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Karena itu, segala bentuk aktivitas politik dan sosial yang dianggap bisa mengganggu kenyamanan penguasa, langsung dibungkam dan diberantas. Inilah salah satu alasan mengapa perjalanan politik Orde Baru bisa bertahan sampai kurang lebih tiga dekade atau 32 tahun.⁶

Memang tidak dapat dimungkiri bahwa di sisi lain, selama masa pemerintahan Orde Baru yang berlangsung dalam tempo yang cukup lama, Presiden Soeharto menjadi sosok yang sangat dihormati karena dianggap berhasil membangun ekonomi. Dalam tempo yang panjang itu juga, banyak tokoh penting baik tingkat nasional maupun internasional yang datang dan pergi mendekati Soeharto sebagai pemimpin utama bangsa Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mulai dikenal oleh dunia karena tampak stabil dan percaya diri sehingga menarik perhatian negara lain.⁷ Mengalami kemajuan di bidang pembangunan bukanlah suatu hasil yang mudah diperoleh bagi suatu bangsa seperti Indonesia pada waktu itu tetapi Soeharto dapat membuktikan

⁵ Teddy Wibisana dkk., *ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2022), hlm. x

⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

⁷ Basuki Agus Suparno, *Reformasi dan Jatuhnya Soeharto* (Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 79-80.

bahwa dirinya adalah sosok pemimpin yang berintegritas. Namun, di sisi lain ada banyak orang menilai bahwa Soeharto menjalankan pemerintahan dengan intensi mendapatkan keuntungan lebih banyak untuk dirinya sendiri dengan keluarganya serta para pengusaha yang menyokong keberadaanya sebagai presiden. Sebab memang kekuasaannya terbentuk dalam lingkaran-lingkaran keluarga dan para sahabatnya sendiri.⁸ Dalam hal ini terbentuk sebuah korporasi di mana penguasa dan pengusaha bersekongkol untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kepentingan rakyat tidak lagi menjadi tujuan utama pemerintahan tetapi kepentingan kelompok-kelompok sajalah yang menjadi pusat perhatian. Alhasil Indonesia menjadi negara yang mengalami krisis di bidang ekonomi dan Soeharto terpaksa mundur karena desakan massa. Reformasi adalah proses perubahan besar yang dilakukan untuk memperbaiki berbagai hal. Perubahan ini mencakup cara berpikir yang baru, yang mengutamakan keterbukaan dan kejujuran.⁹ Hal ini termasuk juga dijaminnya kebebasan berpendapat bagi segenap warga negara. Namun, setelah peristiwa reformasi terjadi tidak dapat dimungkiri bahwa proses perubahan itu sebetulnya belum berjalan mulus. Sebab masih terjadi peristiwa penindasan terhadap rakyat dan adanya dugaan bahwa presiden Habibie masih ditunggangi oleh presiden sebelumnya.

Menyaksikan kenyataan di era Orde Baru dan reformasi tersebut tampaknya menyulut semangat rakyat Indonesia dari berbagai kalangan untuk merebut kembali demokrasi dengan cara berani menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Sebab rakyatlah yang sebenarnya menjadi pemegang kuasa tertinggi dalam negara demokrasi. Suara-suara itu datang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, akademisi, aliansi-aliansi pembela demokrasi dan tidak terkecuali para penyair atau para pecinta sastra.

Dari dunia sastra lahir seorang penulis hebat berkebangsaan Indonesia yang bernama Eka Kurniawan. Ia salah seorang penulis sastra yang mulai menulis sejak masa-masa awal reformasi. Ia telah berhasil menulis banyak karya sastra berkualitas. Terhadap situasi penindasan yang dilakukan oleh para penguasa pada masa sebelum dan sesudah reformasi, Eka pernah menulis sebuah karya yang

⁸ *Ibid.*,

⁹ Emita Distiana, *op.cit.*, hlm. 31.

yang dinilai sangat berani yaitu sebuah buku kumpulan cerpen berjudul *Corat-Coret di Toilet*. Buku kumpulan cerpen ini memuat sebanyak lima belas cerpen dan mengalami beberapa kali proses penerbitan dengan penambahan beberapa cerpen karya Eka sendiri. Adapun tahun penulisan cerpen-cerpen tersebut berkisar dari tahun 1999 sampai awal tahun 2000-an. Dari belasan cerpen yang termuat dalam buku kumpulan cerpen tersebut terdapat tiga cerpen yang hemat penulis berhubungan langsung dengan situasi kebebasan berpendapat warga negara Indonesia pada masa sebelum dan sesudah reformasi. Ketiga cerpen tersebut berjudul *Peter Pan*, *Corat-Coret di Toilet* dan *Gerilya Kota*. Memang Eka Kurniawan tidak pernah menjelaskan bahwa karyanya tersebut merupakan bagian dari tulisan sejarah melainkan sebuah bentuk tanggapan dan kritiknya terhadap situasi sebelum dan sesudah reformasi.

Dalam ketiga cerpen tersebut dikisahkan bentuk-bentuk relasi kuasa yang terjadi pada bangsa Indonesia di masa sebelum dan sesudah reformasi. Eka memberi kritik terhadap perilaku pemerintah yang cenderung menekan dan menindas. Setiap orang yang berani mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pasti akan mengalami perlakuan penindasan melalui tangan-tangan besi para aparat. Oleh karena kerasnya perlakuan pemerintah dan aparat kepada rakyat yang berani berpendapat, maka ada sebagian rakyat yang menulis kritikan dan komentar dalam ruangan yang tertutup, seperti salah satunya yaitu di dinding toilet. Para pendemo juga disangka seperti penjahat dan perusuh yang mengganggu ketertiban umum, maka dari itu perlu disingkirkan dari kehidupan bersama di tengah masyarakat.

Eka Kurniawan menjadikan sastra sebagai sebuah medium untuk menyampaikan pendapatnya tentang suatu realitas atau masalah sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Sebab pada dasarnya sastra tidak dihasilkan dari ruang kosong tetapi berangkat dari suatu kenyataan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Eka Kurniawan hadir sebagai seorang sastrawan yang peduli pada realitas yang terjadi di sekitarnya. Sapardi Djoko Damono menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak benar jika dikatakan bahwa sastrawan tidak peduli pada masalah di masyarakatnya. Sastra itu tidak muncul begitu saja, melainkan lahir

dari kehidupan masyarakat. Bahkan sastra sendiri sering kali membahas masalah-masalah sosial. Jadi, hubungan antara sastrawan, karya sastra dan masyarakat bukanlah hal yang dibuat-buat.¹⁰

Sastra tidak terpisah dari kenyataan-kenyataan yang dialami oleh manusia. Sastra sebetulnya berasal dari realitas kehidupan umat manusia dan dibuat dalam bentuk tulisan yang kaya akan kata-kata kiasan penuh makna. Karya sastra tidak membahas manusia secara langsung, tidak memakai teori atau penjelasan logis. Sebaliknya karya sastra menyampaikan hal itu lewat cerita tentang kehidupan manusia nyata. Bahasanya menggunakan gaya simbolis dan kiasan, penuh makna tersirat, dan tidak bisa dijelaskan secara logis dan jelas sepenuhnya. Jawaban yang diberikan oleh karya sastra lebih seperti pesan atau makna yang bisa dipahami dari cerita. Pertanyaan dan jawaban tentang manusia dalam sastra biasanya tidak disampaikan secara langsung, tetapi tersembunyi dalam alur cerita.¹¹ Di sini semakin jelas bahwa sastra bukanlah suatu entitas yang terpisah dari kehidupan nyata umat manusia tetapi sastra berangkat dari realitas dan masalah sosial yang ada dan oleh penulis, realitas dan masalah sosial itu diangkat menjadi sebuah karya sastra yang kaya akan kata-kata kiasan dan mengandung pesan serta makna tertentu.

Eka Kurniawan menjadikan realitas masalah sosial yang ada sebagai inspirasi sehingga ia mampu menghasilkan sebuah karya sastra. Dalam tiga cerpen *Peter Pan*, *Corat-Coret di Toilet* dan *Gerilya Kota* sangat tampak bahwa kebebasan berpendapat dari setiap warga negara tidak diberi ruang oleh penguasa. Di sini tercipta suatu realitas yang menyimpang dari pesan utama demokrasi bahwa kuasa sesungguhnya berada di tangan rakyat. Kebebasan berpendapat sebetulnya merupakan bukti bahwa kuasa memang tidak hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja tetapi dimiliki oleh semua masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat punya kuasa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada suatu negara demokrasi.

¹⁰ Sapardi Djoko Damono, *Kesusastraan Indonesia Modern: Beberapa Catatan* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1983), hlm. 22.

¹¹ Leo Kleden, "Filsafat Manusia" (Manuskrip, 2023), hlm. 3.

Menyaksikan realitas bagaimana kuasa itu diterapkan dalam negara demokrasi Indonesia pada masa sebelum dan setelah reformasi sebagaimana yang diangkat oleh Eka Kurniawan dalam tiga tercerpen: *Peter Pan*, *Corat-Coret di Toilet* dan *Gerilya Kota*, penulis tertarik menghubungkannya dengan suatu pandangan tentang kuasa yang dinyatakan oleh seorang filsuf Prancis bernama Michel Foucault. Adapun pandangan Foucault tentang kuasa yaitu bahwa kuasa tidak hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu maupun oleh institusi-institusi tertentu. Kuasa itu berada di tengah-tengah masyarakat dan menyebar dalam relasi di tengah masyarakat. Foucault menyebutnya kuasa tetapi bukan kekuasaan. Menurut pandangan Foucault, kuasa bukanlah suatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dijalankan dalam suatu konteks di mana berbagai posisi saling terhubung secara strategis dan terus mengalami perubahan. Kuasa itu beroperasi di segala tempat di setiap situasi yang memiliki struktur, aturan, dan sistem pengaturan serta di mana pun manusia saling berinteraksi dan berelasi dengan lingkungan di situlah kuasa hadir. Kuasa bukan berasal dari luar sistem, melainkan bekerja dari dalam untuk membentuk, mengatur, dan memungkinkan adanya struktur serta hubungan-hubungan tersebut.¹² Foucault juga menjelaskan bagaimana hubungan antara kuasa dan pengetahuan. Pengetahuan tidak dapat muncul tanpa adanya kuasa. Demikian pula kuasa tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan. Keduanya saling berkaitan erat, sebab di dalam pengetahuan terdapat unsur kuasa, begitu pula sebaliknya, kuasa selalu mengandung pengetahuan. Pengetahuan tidak pernah benar-benar netral atau sepenuhnya murni. Ia senantiasa memiliki dimensi politis, bukan karena dampaknya terhadap politik atau penggunaannya dalam konteks kuasa, melainkan karena keberadaannya bergantung pada relasi-relasi kuasa. Ilmu pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri atau menciptakan fondasinya secara independen; keberadaannya ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam struktur relasi kuasa. Foucault melihat bahwa kuasa tidak berasal dari satu pihak tertentu. Karena itulah ia menolak pandangan Marxis, yang melihat kuasa sebagai pertarungan antara dua pihak di mana satu pihak menguasai pihak lain, lalu bisa berbalik arah setelah

¹² K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Jilid II Prancis* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan keenam 2019), hlm. 311.

beberapa syarat terpenuhi.¹³ Kuasa tidak selalu bekerja dengan cara yang menekan atau melarang. Sebaliknya, menurut Foucault, kuasa justru bekerja dengan cara yang membentuk dan menciptakan. Ia mengatakan bahwa kita harus berhenti melihat kuasa hanya sebagai sesuatu yang menekan, menyembunyikan, atau membatasi. Pada kenyataannya, kuasa menciptakan hal-hal baru. Kuasa membentuk kenyataan, menentukan apa yang dianggap sebagai objek, dan membentuk aturan tentang kebenaran. Bahkan manusia dan pengetahuan tentang manusia pun merupakan hasil dari proses ini.¹⁴ Strategi kuasa tidak dijalankan dengan cara menindas, tetapi lewat cara membuat aturan dan menentukan apa yang dianggap normal.

Gagasan kuasa yang disampaikan oleh Michel Foucault ini dapat dihubungkan dengan konsep kebebasan berpendapat warga negara Indonesia dalam tiga cerpen dari kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* karya Eka Kurniawan. Tiga cerpen tersebut menunjukkan bagaimana relasi-relasi kuasa itu bekerja melalui tindakan menekan dan menindas yang dilakukan oleh aparat dan pemerintah sehingga mengakibatkan terbungkamnya kebebasan berpendapat warga negara. Bagi Foucault, kuasa itu tidak bekerja dalam hal-hal yang menekan dan menindas melainkan dalam hal-hal baik yang tidak mengekang kebebasan masing-masing orang yang notabene juga sama-sama mengambil bagian dalam relasi kuasa. Terciptanya kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara merupakan sebuah bukti bahwa kuasa itu memang berada di mana-mana dan tidak dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Untuk memperdalam pemahaman terkait satu tema penting ini maka penulis membuat judul skripsi ini **“ANALISIS KRITIS KONSEP KEBEBASAN BERPENDAPAT WARGA NEGARA INDONESIA DALAM TIGA CERPEN DARI KUMPULAN CERPEN CORAT-CORET DI TOILET KARYA EKA KURNIAWAN DITINJAU DARI GAGASAN KUASA MICHEL FOUCAULT”**.

¹³ *Ibid.*, hlm 312.

¹⁴ Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, terj. Alan Sheridan, (New York: Vintage Book, 1977), hlm. 194.

1.2. Rumusan Masalah

Pembicaraan mengenai kuasa merupakan salah satu gagasan penting yang dikeluarkan oleh Michel Foucault. Foucault menjelaskan bahwa kuasa itu bukanlah satu hal yang dimiliki oleh satu orang, satu kelompok atau satu institusi tertentu melainkan kuasa itu ada di mana-mana tersebar dalam relasi di tengah masyarakat. Kuasa tidak bertujuan untuk hal-hal yang negatif dan tidak bekerja melalui cara-cara yang bersifat menekan atau menindas tetapi kuasa itu bersifat positif dan produktif dalam relasi di tengah masyarakat. Kisah tentang kebebasan berpendapat warga negara Indonesia pada masa sebelum dan sesudah reformasi yang dilukiskan oleh Eka Kurniawan dalam tiga cerpen dari kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet*, diwarnai juga dengan unsur relasi kuasa yang terjadi pada saat itu. Rakyat menjadi tidak bebas dalam menyuarakan pendapatnya dan hanya berani menyuarakan pendapat di tempat-tempat tersembunyi karena takut terhadap perilaku aparat yang menekan dan menindas. Berdasarkan gagasan Michel Foucault tentang kuasa dalam kaitannya dengan konsep kebebasan berpendapat warga negara Indonesia dalam tiga cerpen dari kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet*, maka rumusan masalah dari tulisan ini bisa dibuat seperti berikut ini:

- 1.) Apa itu kuasa menurut pandangan Michel Foucault?
- 2.) Bagaimana konsep kebebasan berpendapat warga negara Indonesia diungkapkan dalam tiga cerpen dari kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* karya Eka Kurniawan?
- 3.) Bagaimana konsep kebebasan berpendapat warga negara Indonesia dalam tiga cerpen dari kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* ditinjau dari gagasan kuasa Michel Foucault?

1.3. Tujuan Penulisan

Terdapat dua tujuan dalam penulisan karya tulis skripsi ini yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari penulisan karya tulis skripsi ini yakni untuk menjelaskan dan memahami bagaimana “Konsep Kebebasan Berpendapat Warga Negara Indonesia Dalam Tiga Cerpen Dari Kumpulan Cerpen *Corat-Coret di Toilet* Karya Eka Kurniawan Ditinjau dari Gagasan Kuasa Michel

Foucault”. Tujuan khususnya adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis demi meraih gelar S1 ilmu Filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, NTT.

1.4. Metode Penulisan

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Adapun data penelitiannya adalah buku kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* karya Eka Kurniawan. Buku kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* karya Eka Kurniawan ini merupakan sumber data primer. Buku kumpulan cerpen ini pertama kali terbit pada tahun 2000 oleh Yayasan Aksara. Setelah itu, pada tahun 2014, buku ini dicetak ulang oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama di Jakarta, lalu diterbitkan kembali oleh penerbit yang sama pada tahun 2016. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2024 buku kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* selalu dicetak ulang oleh penerbit yang sama dan beberapa kali mengalami perubahan cover buku. Pada cetakan terakhir tahun 2024, buku kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* memuat sebanyak lima belas cerpen dengan ISBN 9786020328935. Selain membaca karya-karya Eka Kurniawan, penulis juga membaca buku-buku yang memuat gagasan Michel Foucault tentang kuasa. Terdapat pula beberapa sumber lain yang menjadi tambahan dalam penelitian ini yakni melalui buku-buku, jurnal ilmiah, koran-koran dan majalah yang memiliki kaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

1.5. Sistematika Penulisan

Tulisan skripsi yang berjudul Analisis Kritis Konsep Kebebasan Berpendapat Warga Negara Indonesia Dalam Tiga Cerpen dari Kumpulan Cerpen *Corat-Coret di Toilet* Karya Eka Kurniawan Ditinjau dari Gagasan Kuasa Michel Foucault ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut. Dalam bab I akan dijelaskan uraian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab II akan membahas tentang riwayat Michel Foucault, karya-karyanya dan gagasannya tentang kuasa. Pada bab III penulis membahas tentang riwayat singkat penulis Eka Kurniawan dan karya-karyanya. Berikutnya terdapat sinopsis tiga cerpen dari

kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* dan unsur-unsur dalam cerpen tersebut. Dalam bab IV akan dibahas bagaimana konsep kebebasan berpendapat warga negara Indonesia dalam tiga cerpen dari kumpulan cerpen *Corat-Coret di Toilet* ditinjau dari gagasan kuasa Michel Foucault. Pada bab V sebagai bagian terakhir dari tulisan ini, penulis akan menguraikan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.